

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
WISATA DI PULAU BURUNG

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana



Oleh:

M. KALBU

E05 121 10 58

ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
WISATA DI PULAU BURUNG**

Disusun dan diajukan oleh:

M. KALBU
E051211058

**Mengesahkan,
Pembimbing**



Dr. H.A.M. Rusli, M.Si
NIP. 196407271991031001

**Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu
Pemerintahan**



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si
NIP. 197901062005011001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
WISATA DI PULAU BURUNG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

M. KALBU
E051211058

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si ()

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP M.Si ()

Anggota : Saharuddin.,S.IP.,M.Si ()

Pembimbing : Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Kalbu

NIM : E051211008

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI PULAU BURUNG

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Desember 2024.

Yang membuat pernyataan


M. KALBU



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Wisata di Pulau Burung.” Tak lupa, shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi seluruh umat Muslim.

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Program S-1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena pada hakikatnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Meskipun demikian, penulis memiliki harapan besar agar skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat, baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak lain secara umum. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun tantangan-tantangan tersebut justru menjadi pendorong semangat untuk bangkit dan melanjutkan upaya yang telah dilakukan hingga saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, doa, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, khususnya kepada kedua orang tua, **Ayahanda H. Syarwani H. Saleng**

dan **Ibunda Hajerinani**, yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, baik fisik maupun batin, yang memungkinkan penulis untuk sampai pada tahap ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menentukan jalan hidup sendiri, serta atas segala doa yang terus dipanjatkan kepada Allah SWT demi kemudahan dalam setiap langkah yang penulis ambil. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara dan saudari kandung, yaitu Hasriani, Sawiyah, almarhum Samsul, Fitriani, dan Aisyah, atas semua doa, dukungan, pengorbanan, nasihat, serta harapan mulia yang selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kehangatan keluarga dan semangat yang kalian berikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, melindungi, dan menjaga kita semua dalam kebaikan, kemudahan, dan rahmat-Nya. Aamiin.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor dan seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan dan seluruh jajaran pimpinan di fakultas ini.

3. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak bantuan serta kesempatan dalam menuntut ilmu dan membantu penulis menyelesaikan berbagai urusan administrasi hingga dapat meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Pembimbing, yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, saran, serta bantuan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap usaha dan perhatian yang diberikan selama proses ini. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertai Bapak, dan semoga ilmu yang telah dibagikan menjadi amal yang bermanfaat. Terima kasih atas bimbingan yang tulus dan ketelatenan dalam mendampingi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Tim penguji Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si dan Bapak Saharuddin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan masukan dan saran berharga untuk menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, termasuk Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si,

Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si., Dr. H. Suhardiman Syamsu., S.Sos., M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, Yusriah Ameliah S.IP, M.AP, Muhammad Chaeroel Ansar, S.IP., M.Sc, Afni Arifuddin, S.IP., M.Si, Muhammad Rezky A.Gau, S.IP., M.Si yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

7. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melengkapi berkas-berkas administrasi.
8. Pak Sumardi, Selaku Staf Departemen ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih seluruh informan, yakni Bapak H. Syamsuddin, S.Sos, MM (Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tanah-Bumbu), Ari Herlianto, ST (Kepala Bidang Destinasi Wisata), Ajir Rahman, SE (Analisis Kebijakan), Muhammad Ilmi (Ketua Pokdarwis wisata Pulau burung), Muhammad Yoga (masyarakat Pulau burung), Muhammad Tejar (seleksi wilayah III, Kepala resort wisata), Saidina (Kepala Desa Pulau Burung),

Muhammad Thamrin bin baba(Wisatawan) yang telah banyak sekali membantu dan membagi informasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

10. Untuk ayahanda Abdul Rahim H. Saleng, Hamiyuddin, ibunda Hatijah terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Para sepupu ady palawae alias goval, abdul rahman saleh, Rizkyramadhoni dan Merdayana yang telah menemani penulis selama melakukan penelitian.

12. Kepada arief indrawan terima kasih telah menemani penulis meneliti kelokasi sampai data yang diperlukan didapatkan.

13. Untuk teman-teman Dignite 2021, terima kasih banyak atas kawalan dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. *Circle* Prik terima kasih banyak atas bantuannya dalam proses Menyusun proposal sampai meneliti hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini..

15. Toddopuli, terima kasih banyak teman-teman atas doa dan dukungannya serta kawalanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu bersama-sama.

16. Keluarga Domino Bujang dibawah pimpinan kakanda Saharuddin yang selalu menemani dari pencarian judul, sempro, sampai tugas akhir ini diselesaikan. Saya ucapkan semoga teman-teman di domino bujang selesai semua dengan tepat waktu.

17. Teman-teman KKN KPU Kabupaten Enrekang yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

18. Terakhir, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Tunjukkan penghargaan yang besar karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta selalu menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah sabar.

Makassar, 2 Desember 2024

M. Kalbu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRACT	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Konsep Peran.....	14
2.2. Konsep Pemerintahan	18
2.3. Konsep Pemerintah daerah	23
2.4. Konsep Pengembangan	28
2.5. Konsep kepariwisataan.....	29

2.6. Pengembangan Pariwisata.....	32
2.7. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata.....	34
2.8. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	42
3.3. Sumber Data	42
3.3.1. Data Primer	42
3.3.2. Data Sekunder	43
3.4. Informan Penelitian.....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.5.1. Wawancara mendalam (in depth interview).	45
3.5.2. Observasi	45
3.5.3. Dokumen.....	46
3.6. Fokus Penelitian	46
3.7. Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Bumbu.....	49
4.1.1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu	50
4.1.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, olahraga, dan Pariwisata.....	52

4.1.3. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu	61
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan, kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.	62
4.1.5. Profil Desa Pulau Burung	64
4.1.6. Kondisi Umum Desa.....	65
4.1.7. Visi, Misi, Program, Dan Kegiatan Desa Pulau Burung.....	67
4.2.1. Perencanaan Wisata Di Pulau Burung	75
4.2.2. Pembangunan Wisata Di Pulau Burung.....	81
4.2.3. Kebijakan Wisata Di Pulau Burung	86
4.2.4. Peraturan Wisata Di Pulau Burung	91
4.2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembangan Potensi pariwisata Di Pulau Burung	97
BAB V PENUTUP.....	108
5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu	50
Gambar 4.2 SOTK Dinas Kebudayaan kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.....	60
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) DESA.....	72
Gambar 4.4 Alur Perencanaan Pengembangan Wisata Pulau Burung...	75
Gambar 4.5 Rencana Pengembangan Pariwisata Pariwisata WPP	76
Gambar 4.6 Perencanaan Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Tanah Bumbu.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengunjung	10
Tabel 4.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Umur.....	66
Tabel 4.2 Pembangunan Infrastruktur pariwisata Pulau Burung.....	82
Tabel 4.3 Capaian Kinerja dalam Pembangunan Infrastruktur di Pulau Burung.....	89
Tabel 4.4 Alokasi Anggaran Sektor Pariwisata RKPD Kabupaten Tanah Bumbu 2024.....	101
Tabel 4.5 Latar Pendidikan Pokdarwis.....	105

ABSTRACT

M. Kalbu, with Student Identification Number E051211058, from the Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, is currently working on a thesis titled The Role of Local Government in Developing Tourism Potential on Pulau Burung under the supervision of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

This study aims to analyze the role of local governments in the development of tourism potential in Bird Island, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan. The method used is a qualitative descriptive approach with case studies, which involves in-depth interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The focus of the research includes planning, development, policies, and regulations implemented by local governments.

The results of the study show that the role of local governments in tourism development on Bird Island includes destination planning, infrastructure development, and the preparation of policies and regulations that support the growth of the tourism sector. However, there are several obstacles faced, such as limited funding, lack of competent human resources, and lack of tourism support facilities. Supporting factors include support from local governments, collaboration with the private sector, and local community involvement.

This study concludes that the development of tourism potential on Bird Island requires better synergy between local governments, managers, and the community to create sustainable tourist destinations. The results of this study are expected to be a reference for the development of tourism in other regions that have similar characteristics.

Keywords: The role of local governments, tourism development, Bird Island, sustainable tourism.

ABSTRAK

M. Kalbu, dengan Nomor Induk Mahasiswa E051211058, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, sedang menyusun skripsi berjudul **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Wisata di Pulau Burung** di bawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi wisata di Pulau Burung, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Fokus penelitian meliputi perencanaan, pembangunan, kebijakan, dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata di Pulau Burung meliputi perencanaan destinasi, pembangunan infrastruktur, serta penyusunan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya fasilitas penunjang pariwisata. Faktor pendukung meliputi dukungan dari pemerintah daerah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan potensi wisata di Pulau Burung membutuhkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pengelola, dan masyarakat untuk menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan pariwisata daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Kata kunci: Peran pemerintah daerah, pengembangan wisata, Pulau Burung, pariwisata berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang melimpah, yang mampu membantu mengatasi masalah-masalah mendasar melalui peningkatan penerimaan devisa dan pendapatan daerah. Dengan memanfaatkan keberagaman ini, Indonesia dapat mengembangkan potensi-potensinya, khususnya dalam sektor pariwisata. Kedatangan wisatawan ke Indonesia tidak hanya mencari keindahan alamnya, tetapi juga berdampak positif baik dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin terkenal Indonesia di mata internasional akan berkontribusi pada peningkatan devisa, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi yang besar, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan potensi perairannya.

Pengembangan pengelolaan potensi pariwisata sangat penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. Berbagai aspek potensi dapat dikelola untuk meningkatkan tempat wisata, seperti keanekaragaman flora dan fauna, warisan budaya, daya tarik alam, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat potensi pariwisata, menganalisis pandangan masyarakat terhadap

pengembangan potensi pariwisata, serta merumuskan strategi pengembangan potensi pariwisata di Pulau Burung.

Pengembangan pariwisata memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan kemajuan sebuah daerah. Hasil yang diperoleh dari sektor pariwisata di Indonesia bisa menjadi salah satu sumbangan utama dalam pendapatan pajak negara. Pariwisata juga dapat menjadi identitas atau ciri khas suatu wilayah, membedakannya dari daerah lainnya.

Oleh karena itu Kehadiran pemerintah sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Pulau Burung. Tanpa dukungan pemerintah, pihak pengelola dan masyarakat sulit untuk mengembangkan destinasi pariwisata tersebut agar dapat berkembang dan terjaga. Peran pemerintah di sini adalah sebagai mediator atau lembaga untuk menangani berbagai masalah yang muncul dalam hubungan antarindividu, antarkelompok, antarwarga negara, atau antara masyarakat dengan negara, berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. (Raga,1999 :16).

Menurut Dwyer and Spurr (2009:15), pariwisata merupakan kekuatan global yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan regional. Pengembangan sektor pariwisata membawa sejumlah manfaat dan biaya dalam konteks pertumbuhan ekonomi pariwisata. Industri pariwisata juga dikenal sebagai salah satu sektor terbesar di dunia yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di

destinasi pariwisata. Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara (Kesuma, 2015:102). Pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang memberikan peluang kerja dengan cepat, serta dapat membangkitkan sektor produksi lainnya di wilayah pariwisata (Waskito, 2013:16).

Pengaruh positif dari pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi mencakup penciptaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi negara, dan distribusi pembangunan. Namun, terdapat dampak negatif seperti kebocoran pendapatan dan sifat pekerjaan yang musiman. Menurut Lie (2004:3), pertumbuhan industri pariwisata di suatu wilayah sangat tergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Kedatangan wisatawan menjadi indikator kesuksesan industri pariwisata yang berpotensi memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, perkembangan pariwisata juga berdampak tidak langsung pada masyarakat. Menurut Samimi (2011:29), di negara-negara berkembang, sektor pariwisata menjadi sektor ekspor yang signifikan.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi penting untuk memastikan kesempatan usaha yang merata dan mendapatkan manfaat, serta untuk mengatasi tantangan perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang efektif, pemerintah pusat telah

mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengembangan potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing.

Pengembangan pariwisata direalisasikan melalui pelaksanaan rencana pengembangan wisata yang mempertimbangkan keberagaman, keunikan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Sektor pariwisata, sebagai pendorong ekonomi masyarakat, diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui strategi pengembangan objek wisata. Albarq. (2014) menyatakan bahwa minat wisatawan dipengaruhi oleh rangsangan, seperti keunikan, keaslian, nilai, dan keindahan, yang akan membentuk persepsi positif mereka terhadap objek wisata.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 yang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) di 50 destinasi pariwisata nasional dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Undang-undang tentang kepariwisataan mengatur pembangunan sektor pariwisata, termasuk industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan struktur kelembagaan terkait. Pembangunan ini didasarkan pada rencana induk kepariwisataan yang mencakup rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Fokus pembangunan adalah pada aspek keberlanjutan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif industri pariwisata terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata diperlukan untuk memperluas kesempatan berusaha dan mendapatkan manfaat secara merata, serta untuk menghadapi tantangan perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan global. Indonesia memiliki beragam potensi pariwisata, termasuk sumber daya alam dan kekayaan budaya, yang menjadi daya tarik utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menggarisbawahi bahwa alam, flora, fauna, serta warisan purbakala, sejarah, seni, dan budaya Indonesia merupakan sumber daya utama dalam pembangunan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengembangan pariwisata diimplementasikan melalui penyusunan rencana pengembangan destinasi wisata yang memperhatikan keberagaman, keunikan budaya dan alam, serta kebutuhan wisatawan. Sebagai motor ekonomi masyarakat, sektor pariwisata diharapkan dapat berkelanjutan melalui strategi pengembangan objek wisata. Albarq (2014) menyatakan bahwa minat wisatawan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunikan, keaslian, nilai, dan keindahan, yang akan membentuk persepsi positif terhadap destinasi wisata.

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kondisi geografis dan karakteristik wilayahnya yang masih alami, serta budaya masyarakat yang berorientasi pada kearifan lokal, menjadikan Kalimantan Selatan memiliki beragam potensi daya tarik wisata yang jika dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah maupun negara.

Tanah Bumbu, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beragam destinasi wisata yang tersebar di seluruh wilayahnya, baik itu berupa wisata budaya maupun alam yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dengan mengandalkan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Potensi

pariwisata di sana meliputi wisata pantai, goa, pegunungan, dan pulau, yang memiliki keunikan tersendiri yang didasarkan pada pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal.

Pulau Burung salah satu pulau yang terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama pulau ini berasal dari ekosistem mangrove yang mendominasi wilayahnya. Pulau ini dihuni oleh sekitar 200 penduduk dan memiliki kantor desa. Selain itu, pulau ini juga sudah dialiri listrik dari tenaga diesel. Pulau Burung juga merupakan destinasi wisata mangrove yang semakin populer.

Namun, perkembangan objek wisata di Tanah Bumbu masih terhambat oleh kurangnya inovasi dan perhatian dari pihak pengelola. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di wilayah Tanah Bumbu adalah Pulau Burung, yang awalnya merupakan Kawasan Cagar Alam dan kemudian berubah fungsi menjadi Taman Wisata Alam di wilayah Selat Laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Bab 2 pembangunan destinasi pariwisata daerah pasal 12 mengenai pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a meliputi Pembangunan Prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata Sejalan dengan itu Peraturan Daerah (PERDA)

Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2021 Pasal 28 mengenai Kebijakan pembangunan prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d meliputi: Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah. Desa Pulau Burung terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berjarak sekitar 3 km dan ditempuh dengan waktu 15 – 20 menit dari pusat kecamatan. Desa ini merupakan destinasi wisata yang menonjol di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Hutan Mangrove sebagai produk wisata utamanya.

Wisata Hutan Mangrove di Pulau Burung tersebut juga dibawah naungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan **Nomor : SK.652/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019** **TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 SELUAS KURANG LEBIH 545 HA.** Dimana saat ini, ada pembagian dalam pengelolaan keuangan sesuai SK yang dikeluarkan bahwa Hutan Mangrove dibawah naunganya. BKSDA diberikan kurang lebih 19% atau Rp. 7.500 per orang dari 100% Rp. 40.000 Hutan Mangrove pulau burung dikelola sebagai taman Wisata alam Pendidikan berbasis masyarakat. Wisata Hutan Mangrove menyediakan berbagai fasilitas yang mencakup kapal transportasi dengan kapasitas 10-15 orang, titian kayu sepanjang 1000 m untuk menyusuri hutan mangrove bagi

wisatawan, pasokan air bersih, listrik, toilet, pondok peristirahatan seperti gazebo, villa, serta aula wisata yang mampu menampung hingga 80 orang untuk acara pertemuan. Juga, tersedia jembatan dari dermaga dan fasilitas lainnya. Kehadiran beragam fasilitas ini menjadi bukti kelayakan dan kualitas wisata Hutan Mangrove yang tidak diragukan lagi. Namun, jika melihat dari aspek kecukupan fasilitas, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar wisata menarik dilihat oleh pengunjung.

Selain wisata alam, juga terdapat atraksi wisatanya dipulau tersebut ada 2 *event* tahunan yang rutin dilaksanakan yaitu Selamatan Kampung "*Mappanre Kampung*" Dan HUT Desa. Selamatan kampung merupakan acara budaya yang sudah dilaksanakan secara turun temurun, sedangkan HUT Desa itu biasanya dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan Lomba seperti mancing, lomba balapan perahu, lomba foto wisata, dll. Kedua acara atau event tahunan itu merupakan bagian dari atraksi penunjang wisata yang bisa mengundang pengunjung atau wisatawan untuk berkunjung ke pulau burung, dan juga ditambah flora musiman seperti durian, langsung, rambutan dan lainnya yang mampu sebagai magnet bagi wisatawan. Dipulau juga terdapat fauna seperti populasi Bekantan yaitu Monyet Ekor panjang yang menjadi maskot Kalimantan selatan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal penulis bahwa pengembangan wisata di pulau burung tampaknya masih belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti sarana dan prasarana penunjang wisata misalnya tidak tersedianya fasilitas didalam destinasi wisata seperti rumah makan belum tersedia, armada penyeberangan (kapal) masih kurang, toilet dalam kondisi rusak, ketersediaan *homestay* atau penginapan masih kurang, listrik (PLN) belum ada. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung destinasi wisata di Pulau Burung di karenakan tiap tahunnya jumlah pengunjung mengalami penurunan diambil dari 4 tahun terakhir 2021, 2022, 2023 dan 2024. Sejalan dengan menurunnya jumlah pengunjung (Wisatawan) di Pulau Burung Secara lebih detail jumlah Pengunjung Wisata Pulau Burung Sejak tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Pengunjung

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Januari	641	441	99	172
Februari	201	62	41	156
Maret	225	212	14	91
April	182	-	32	143
Mei	105	382	37	97
Juni	418	136	24	54
Juli	322	130	115	22
Agustus	-	40	313	15
September	171	122	138	73
Oktober	410	146	50	-
November	249	128	145	-

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Desember	340	182	145	-
Jumlah	3.294	1.981	1.153	823

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, 2024

Oleh karena itu, masalah ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hal tersebut juga didukung penjelasan dari pihak pengelola destinasi wisata(Pokdarwis) dipulau burung yang mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah sendiri, meskipun sudah memberikan bantuan, masih belum optimal karena masih ada sarana dan prasarana penunjang wisata yang harus dibangun. Misalnya, jembatan penghubung atau penyeberangan, pasokan listrik (PLN), dan kapal pengunjung. Jika sarana dan prasarana sudah baik, baru kami bisa mengelola wisata dengan optimal sehingga wisatawan merasa nyaman dan wisata luar tertarik berkunjung ke tempat wisata ini. Sebagai pengelola, kami sangat ingin membangun pariwisata, oleh karena itu kami mengusulkan pembangunan dan pengembangan ini kepada pemerintah. Kami berharap pemerintah turut serta dalam mengembangkan wisata ini):

Dari uraian diatas, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pengembangan Wisata, termasuk dalam pengembangan objek wisata, pemasaran, dan pembentukan kelembagaan desa wisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Pemerintah Daerah Tanah Bumbu diwajibkan untuk aktif mengembangkan Wisata.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi wisata Di Pulau Burung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu dalam perencanaan, pembangunan, peraturan dan kebijakan dalam pengembangan Wisata Dipulau Burung?
2. Faktor-Faktor apakah mempengaruhi pengembangan wisata dipulau burung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu dalam perencanaan, pembangunan, peraturan dan kebijakan dalam pengembangan Wisata Dipulau Burung ?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apakah mempengaruhi pengembangan wisata di Pulau Burung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa perspektif tambahan bagi anggota akademis program studi ilmu pemerintahan, yang akan menjadi materi penting dalam studi Ilmu Pemerintahan terkait dengan pengembangan wisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata. Khususnya bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan, saran, dan evaluasi kepada semua pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ilmiah lain yang memiliki fokus yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah penjelasan mendalam mengenai teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memperinci dan menjelaskan masalah penelitian. Fungsi utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks penelitian dan mendukung interpretasi terhadap realitas yang diamati. Dalam melakukan analisis terhadap masalah penelitian, diperlukan fondasi konseptual yang kuat yang kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

2.1. Konsep Peran

Menurut Role Theory (Teori Peran) Teori peran menekankan bahwa peran merupakan konstruksi sosial yang diberikan kepada individu berdasarkan status atau posisi sosial mereka dalam masyarakat. Menurut teori ini, peran mencakup ekspektasi yang terkait dengan perilaku, tanggung jawab, dan hak-hak individu dalam konteks sosial tertentu.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diantisipasi oleh orang lain terhadap seseorang berdasarkan posisi atau statusnya dalam suatu sistem. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor sosial, baik internal maupun eksternal, dan cenderung tetap atau stabil dalam jangka waktu tertentu (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan beberapa definisi peran: Peran mengacu pada kumpulan perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi atau kedudukan dalam masyarakat. Lebih lanjut, Veithzal Rivai dan Silviana Murni menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diatur dan diantisipasi dari seseorang dalam konteks posisi tertentu.

- a. Peran merupakan figur yang diasumsikan dalam sebuah drama, sehingga ia berperan sebagai pemeran utama atau aktor utama.
- b. Peran adalah bagian dari karakter yang dimainkan oleh seorang aktor dalam sebuah drama, yang berusaha untuk memerankan semua peran dengan baik.
- c. Peran adalah bagian integral dari tanggung jawab utama yang harus dijalankan. Teori peran adalah suatu kerangka teoritis yang digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi, yang menggabungkan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Teori peran membahas konsep "peran" yang umumnya terkait dengan dunia teater, di mana seorang aktor dalam teater diharapkan untuk memainkan peran tertentu sesuai dengan karakternya dalam cerita. Analogi ini menyatakan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat bisa dibandingkan dengan posisi seorang aktor dalam drama, dan keduanya memiliki persamaan dalam konteks perannya (Sarwono, 2015:215).

1. Menurut Koziar Barbara, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu sistem.
2. Soekanto (2009:212-213) menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis dari kedudukan atau status seseorang.
3. Menurut Merton (dalam Raho, 2007:67), peran adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang menduduki suatu status tertentu.

Lebih lanjut, peran menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan merupakan sebuah proses Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

1. Melibatkan norma-norma yang terkait dengan posisi individu dalam masyarakat.
2. Merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam masyarakat.
3. Menyiratkan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran juga dapat dikenali melalui partisipasi, kontribusi, struktur organisasi, penetapan tujuan, dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan: melakukan dan mengeksekusi keputusan.
2. Jenis kontribusi: termasuk ide, tenaga, atau materi, dan lain sebagainya.

3. Struktur kerja bersama: bekerja bersama dalam berbagai peran yang setara.
4. Menetapkan tujuan: menetapkan bersama dengan kelompok atau pihak lain.
5. Peran dalam masyarakat: sebagai subjek. (Soehendy, 1997:28).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan dimensi yang dinamis dari posisi seseorang dalam konteks harapan yang diberikan oleh individu lain terhadap status tertentu yang diemban.

Menurut Mintzberg dalam buku "Pengantar Manajemen" dan "Kepemimpinan Dalam Manajemen" yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), terdapat beberapa peran yang dijalankan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi.

Dalam peran antarpribadi (Interpersonal Role), seorang atasan harus berperan sebagai figur, pemimpin, dan penghubung untuk memastikan kelancaran operasional organisasi yang ia pimpin.

Peran yang berkaitan dengan informasi (Informational Role) menempatkan atasan pada posisi istimewa dalam hal memperoleh dan mengelola informasi. Sementara itu, dalam peran pengambil keputusan (Decisional Role), atasan harus aktif terlibat dalam proses pembuatan strategi organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg menyimpulkan bahwa tugas utama seorang atasan pada dasarnya adalah mempertimbangkan sistem pembuatan strategi organisasi secara menyeluruh.

Pada dasarnya, peran dapat dijelaskan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang muncul dari jabatan tertentu. Kepribadian individu juga memengaruhi cara pelaksanaan peran tersebut. Terlepas dari tingkat hierarki, peran yang dimainkan oleh individu tidak memiliki perbedaan yang signifikan; baik itu peran yang dijalankan oleh pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah, semuanya memiliki esensi yang sama.

2.2. Konsep Pemerintahan

Awalnya, pemerintahan dibentuk untuk mencegah kekacauan dalam sebuah wilayah yang dihuni manusia. Situasi tersebut memicu munculnya individu atau kelompok yang memengaruhi pembentukan kelompok lain. Seiring waktu, kelompok tersebut menjadi kelompok khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keselamatan masyarakat. Akhirnya, kelompok ini menjadi minoritas yang memiliki kekuasaan mutlak untuk bertindak atas nama mayoritas (rakyat) atau bahkan kepentingan mereka sendiri.

Pemerintahan dipandang sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur manusia, mirip dengan perusahaan besar yang mengelola berbagai aspek kehidupan manusia. Lebih lanjut, konsep Pemerintahan berasal dari berbagai pendekatan filosofis politik sebelumnya, karena diakui bahwa studi tentang Pemerintahan, baik kelebihan maupun kekurangannya, adalah bagian integral dari ilmu politik dalam lingkup yang luas.

Dalam konteks politik, Pemerintah dianggap sebagai satu dari tiga cabang kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh konsep Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu. Selain cabang legislatif dan yudikatif, cabang eksekutif dianggap sebagai representasi Pemerintahan dalam arti yang lebih sempit. Spesifikasi ini mendorong pertanyaan tentang bagaimana proses Pemerintahan dalam arti sempit dapat beroperasi secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mendorong sejumlah akademisi di bidang administrasi negara untuk menguraikan bagaimana konsep Pemerintahan sebagai ilmu dapat diimplementasikan melalui lembaga-lembaga yang bertindak sebagai pelaksana setiap keputusan politik.

Secara etimologis, asal kata "Pemerintahan" adalah "perintah". Menurut W.Y.S Poerwadarmita, konsep perintah memiliki beberapa makna:

- a. Perintah adalah ungkapan yang bertujuan untuk menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Perintah juga merujuk pada kekuasaan yang mengatur suatu negara atau wilayah, yang dipegang oleh badan tertinggi seperti kabinet pemerintahan.

Samuel Edward Finer mengakui adanya dua pengertian Pemerintahan: luas dan sempit. Dengan adanya dua pengertian ini, Pemerintahan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pemerintahan dalam arti sempit merujuk pada tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif, seperti presiden dengan bantuan para menteri, untuk mencapai tujuan negara.
2. Pemerintahan dalam arti luas mencakup tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan pemerintahan negara.

Dalam buku "Pengantar Ilmu Pemerintahan" karya Inu Kencana Syafie, Pemerintahan dijelaskan sebagai sebuah ilmu dan seni. Dipandang sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan karisma dan keahlian tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang pemerintahan. Namun, sebagai disiplin ilmu, Pemerintahan memenuhi kriteria sebagai suatu bidang studi yang dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek yang dapat diteliti baik secara material maupun formal, bersifat universal, dan memiliki sistematisitas yang khas. Asal kata "Pemerintahan" sendiri berasal dari "perintah", yang memiliki empat unsur dasar: adanya dua pihak yang terlibat, adanya hubungan saling ketergantungan antara kedua pihak tersebut, pihak yang memerintah memiliki kewenangan, dan pihak yang diperintah memberikan ketaatan.

Menurut Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf dalam bukunya "Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia", secara umum Pemerintahan dapat dijelaskan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan mengimplementasikan hukum serta peraturan

di suatu wilayah tertentu. Pemerintahan merupakan sebuah entitas yang memiliki ciri-ciri berikut:

1. Memiliki otoritas yang berasal dari suatu entitas politik.
2. Memiliki kekuasaan yang mengatur masyarakat politik.
3. Terdiri dari aparat pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Memiliki wewenang untuk membuat regulasi hukum untuk menangani konflik dan mengeluarkan keputusan administratif, serta memiliki monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Haiyanta (1997), fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan:

Pemerintah bertugas mengatur segala sektor dalam masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, baik berupa peraturan pemerintah maupun regulasi lainnya. Tujuan utama dari fungsi ini adalah untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan pertumbuhan negara sesuai dengan yang diinginkan.

2. Fungsi Pemberdayaan:

Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan berupa kesempatan, pengetahuan, keahlian, dan sumber daya lainnya kepada individu yang semula tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka menjadi lebih mampu mengatasi permasalahan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Peranan pemerintah sangat

penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui upaya, bantuan, dan intervensi yang diberikan.

3. Fungsi Pelayanan:

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Tujuan utama pendirian pemerintahan adalah memastikan terjaganya sistem ketertiban dalam masyarakat sehingga kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah modern pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya guna mencapai kemajuan bersama. Secara struktural, pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, yang memiliki kekuasaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan serta prinsip otonomi sebanyak mungkin.

2.3. Konsep Pemerintah daerah

Dalam memahami konsep pemerintahan daerah, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kita perlu memahami makna atau definisi dari pemerintahan daerah itu sendiri. Kedua, kita harus memperhatikan berbagai bentuk atau model pemerintahan daerah yang ada. Dan ketiga, kita juga perlu mempertimbangkan lingkungan atau faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja pemerintahan daerah.

1. Dimensi Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah "konsep pemerintahan daerah" diterjemahkan dari konsep "*local government*" yang pada dasarnya memiliki tiga makna, yaitu: pertama, merujuk pada pemerintah tingkat lokal; kedua, merujuk pada pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal; dan ketiga, merujuk pada wilayah atau area lokal.

Pemerintah lokal dalam pengertian pertama mengacu pada badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau daerah merujuk kepada entitas yang memimpin dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat daerah. Di Indonesia, hal ini mengacu pada kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari di tingkat daerah. Kedua

lembaga ini sering disebut sebagai pemerintah daerah atau otoritas lokal.

Pemerintahan lokal dalam pengertian kedua merujuk pada aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan pengaturan yang merupakan aspek penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini sebagian besar berkaitan dengan pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi landasan atau arah bagi pelaksanaan pemerintahan. Sama seperti pemerintah pusat, pemerintahan daerah juga memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab atas fungsi legislatif dan eksekutif, sementara fungsi yudikatif tetap menjadi domain pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebenarnya berkaitan dengan pembuatan kebijakan pemerintahan daerah, bukan seperti fungsi legislatif parlemen yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Sementara itu, fungsi yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lembaga peradilan lainnya. Istilah "legislatif" dan "eksekutif" tidak umum digunakan dalam konteks pemerintah lokal; yang lazim digunakan adalah "fungsi pembuatan kebijakan" dan "fungsi pelaksanaan kebijakan". Fungsi pembuatan kebijakan

dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh pejabat yang diangkat atau birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif,2007:24).

Pemerintahan lokal dalam pengertian ketiga mengacu pada wilayah administratif atau daerah otonom, terutama dalam konteks Indonesia. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah tersebut. Kewenangan ini termasuk dalam urusan rumah tangga daerah. Kewenangan untuk mengatur ini tercermin dalam pembuatan peraturan daerah yang merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah, sementara kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah diimplementasikan melalui pelaksanaan peraturan daerah dalam bentuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Menurut Tjahja Supriatna (dalam Hanif: 2007), yang mengutip pendapat de Guzman dan Taples, unsur-unsur pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah merupakan hasil subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum.
- c. Pemerintah daerah memiliki badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.

- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah daerah memberikan layanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dalam konteks fungsi umum pemerintahan, unsur-unsur tersebut juga meliputi bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat di wilayah yurisdiksinya.

2. Bentuk Pemerintahan Daerah

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu

Local Self Government dan Local State Government.

1. *Local Self Government*

Pemerintah daerah dalam bentuk Local Self Government memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan sendiri. Bentuk ini diperlukan oleh sistem pemerintahan suatu negara untuk menangani urusan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Terdapat kebutuhan untuk memperhatikan bahwa dalam beberapa hal, pemerintahan di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah. Ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan dinamika daerah serta masyarakatnya. Demikian pula, untuk

wilayah-wilayah khusus, diperlukan pembentukan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan lokal tersebut. Meskipun pemerintah daerah dalam bentuk Local Self Government memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, namun posisinya tetap merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara sebagai subsistem.

2. *Local State Government*

Pemerintahan wilayah, juga dikenal sebagai local state government, merupakan unit organisasi pemerintahan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Tujuan utama pembentukan pemerintahan wilayah adalah untuk mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, karena tidak semua urusan tersebut dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat dengan efisien dan efektif. Pemerintahan wilayah bertugas menyelenggarakan instruksi, arahan, petunjuk, dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kehadiran pemerintahan wilayah sangat penting terutama di wilayah yang luas dan memiliki kendala komunikasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi sosial juga dianggap penting, karena banyak pelayanan pemerintah yang bergantung pada interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan wilayah juga memegang peran penting dalam memperoleh respek

masyarakat terhadap program-program pemerintah. Namun, fokus tugas pemerintahan wilayah terbatas pada pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3. Lingkungan Pemerintah Daerah

Bentuk, struktur, dan fungsi pemerintah daerah di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana mereka beroperasi. Seperti halnya organisasi lainnya, pemerintah daerah juga berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dapat memberikan dukungan atau menjadi hambatan bagi aktivitas organisasi. Karena itu, adaptasi terhadap lingkungan menjadi kunci keberlangsungan organisasi. Kemampuan organisasi dalam memengaruhi lingkungannya juga sangat penting. Menurut Muttalib dan Akbar Ali Khan (1971)

2.4. Konsep Pengembangan

Pengembangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:538), adalah suatu proses dan metode. Menurut Poerdarmita (2002:474), pengembangan adalah langkah atau teknik untuk memajukan, meningkatkan kualitas, mencapai kesempurnaan, dan meningkatkan kegunaan suatu hal.

Pada esensinya, pengembangan adalah usaha pendidikan baik dalam bentuk formal maupun non-formal yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, tujuan yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan, bertujuan untuk memperkenalkan,

mengembangkan, dan membimbing individu untuk mencapai kepribadian yang seimbang, utuh, dan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuan mereka.

Tujuannya adalah memberikan pondasi yang kuat bagi individu untuk mengembangkan diri mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai kemandirian pribadi dengan mencapai martabat, kualitas hidup, dan kemampuan manusiawi yang optimal. (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari; 2014).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah upaya yang disengaja, direncanakan, dan diarahkan untuk menciptakan atau memperbaiki sesuatu agar menjadi lebih bermanfaat dalam meningkatkan dan mendukung kualitas, serta untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

2.5. Konsep kepariwisataan

Pariwisata adalah istilah yang digunakan ketika seorang wisatawan melakukan perjalanan sendiri, atau dalam kata lain, aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 2008). Definisi pariwisata lainnya adalah kegiatan dalam masyarakat yang terkait dengan wisatawan (Soekadijo, 2000). Meyers (2009) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan aktivitas perjalanan sementara oleh seseorang dari tempat tinggal asal ke daerah tujuan, tidak untuk

menetap atau mencari nafkah, tetapi hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau tujuan lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab I Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Secara esensial, berpariwisata adalah suatu proses pergi sementara dari tempat tinggal seseorang atau lebih, menuju tempat lain di luar tempat tinggal mereka. Motivasi pergi bisa bermacam-macam, termasuk alasan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, atau kepentingan lainnya, seperti eksplorasi, pengalaman baru, atau pembelajaran. Pariwisata seringkali diasosiasikan dengan perjalanan wisata, yang merupakan pemindahan sementara seseorang dari tempat tinggalnya karena alasan tertentu, dan bukan untuk melakukan pekerjaan berbayar. Dengan kata lain, perjalanan wisata adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepuasan dan memenuhi keinginan untuk mengetahui lebih banyak hal (Suwantoro, 2004).

Pariwisata merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, terutama dalam konteks aktivitas sosial dan ekonomi. Awalnya, aktivitas pariwisata hanya dinikmati oleh segelintir orang

kaya pada awal abad ke-20, namun sekarang telah menjadi hak asasi manusia yang diakui, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Indonesia, sebagai negara berkembang, berupaya memajukan industri pariwisata sebagai salah satu strategi untuk mencapai keseimbangan neraca perdagangan luar negeri. Pembangunan industri pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pemasukan devisa negara. Seperti yang diakui, sektor pariwisata di Indonesia masih memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan merupakan faktor strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta devisa negara (Pendit, 2004).

Menurut Pendit (2004), terdapat beberapa jenis pariwisata yang telah dikenal, yaitu:

- a. Wisata budaya: Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan memperluas wawasan seseorang melalui kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan, adat istiadat, budaya, seni, dan gaya hidup mereka.
- b. Wisata kesehatan: Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah lingkungan dan kondisi sehari-hari untuk kepentingan relaksasi dan pemulihan jasmani dan rohani.

- c. Wisata olahraga: Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk berolahraga atau berpartisipasi dalam acara olahraga di suatu tempat atau negara.
- d. Wisata komersial: Perjalanan yang meliputi kunjungan ke pameran-pameran dan acara komersial seperti pameran industri dan pameran dagang.
- e. Wisata industri: Perjalanan yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum ke kompleks atau daerah industri untuk melakukan peninjauan atau penelitian.
- f. Wisata Bahari: Jenis wisata yang berkaitan dengan danau, pantai, atau laut.
- g. Wisata Cagar Alam: Wisata yang diatur oleh agen perjalanan yang khusus menyediakan perjalanan ke cagar alam, taman lindung, hutan pegunungan, atau area lain yang dilindungi oleh undang-undang.
- h. Wisata bulan madu: Perjalanan khusus bagi pasangan pengantin baru dengan fasilitas yang disesuaikan untuk menikmati masa bulan madu mereka.

2.6. Pengembangan Pariwisata

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah upaya untuk memajukan suatu tempat atau daerah dengan cara merawat apa yang sudah ada atau menciptakan yang baru sesuai kebutuhan. Dengan demikian,

pengembangan pariwisata melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai kesatuan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang berkaitan secara langsung dengan kemajuan pariwisata karena peran penting pariwisata dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dan pengembangannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata sangatlah penting.

Menurut Muljadi dan Warman (2014), prasarana kepariwisataan mencakup semua fasilitas yang mendukung infrastruktur pariwisata dan memberikan layanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk:

1. Fasilitas transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, bandara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat, dan stasiun kereta api.
2. Sistem pasokan tenaga listrik dan air bersih.
3. Layanan perbankan dan moneter.
4. Sistem telekomunikasi.

Salah satu strategi untuk meningkatkan manfaat wilayah secara positif, baik dari segi ekonomi maupun sosial-budaya, adalah melalui pembentukan Desa Wisata. Desa Wisata harus tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, tradisi, dan ciri

khas masyarakatnya tanpa mengurangi esensi tersebut. Desa Wisata merupakan kombinasi dari atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam konteks kehidupan masyarakat yang melekat pada tata cara dan tradisi setempat, sehingga membuat desa tersebut menjadi tujuan wisata yang

2.7. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; pembangunan fasilitas utama, perencanaan daerah atau area destinasi wisata, dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung pariwisata, termasuk jalan, bandara, dan sarana publik lainnya. Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses wisatawan ke lokasi wisata. Selain itu, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas lokal, dan lembaga terkait juga penting dalam mengoptimalkan pengembangan pariwisata. Melalui perencanaan, pengelolaan, dan promosi bersama, kerjasama ini akan memastikan bahwa

potensi pariwisata suatu daerah dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak terkait.

Sebagai bagian dari industri jasa perdagangan, kegiatan pariwisata sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam beberapa aspek, seperti pengembangan dan pembangunan (*development*) fasilitas penting, perencanaan (*planning*) destinasi wisata, formulasi kebijakan (*policy*) pariwisata, serta pembuatan dan penegakan regulasi (*regulation*) terkait. Berikut adalah penjelasan tentang peran-peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam sektor pariwisata, sebagaimana diuraikan oleh (Subadra 2006).

1. Perencanaan Pariwisata

Industri pariwisata memiliki karakteristik yang unik, yang dapat menghasilkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi karakteristik khusus ini dan memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan perencanaan pariwisata yang teliti. Kesalahan dalam perencanaan ini dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah dan konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat. Setiap destinasi wisata memiliki

tantangan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalahnya.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan penggunaan lahan (2) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan bandar udara, jalan dan keperluan lainnya seperti; air, listrik, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan area wisata dan para wisatawan.

2. Pembangunan Pariwisata

Meskipun sebagian besar pembangunan pariwisata dilakukan oleh sektor swasta, terutama dalam hal fasilitas dan layanan pariwisata, namun pengadaan infrastruktur umum seperti listrik, jalan, dan air yang terkait dengan pengembangan pariwisata, khususnya proyek-proyek besar yang membutuhkan investasi besar seperti pembangunan

jalan, bandara, pengelolaan limbah, dan penyediaan air bersih, merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan penjamin bagi para investor yang menyuntikkan modalnya dalam upaya meningkatkan pembangunan pariwisata.

3. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merujuk pada rencana jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan langkah-langkah untuk mencapainya, yang diatur dalam dokumen formal seperti undang-undang dan dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dijadikan pedoman yang harus diikuti oleh para pihak terkait. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan politik, terutama dalam konteks politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang bergantung pada wisatawan asing.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan meningkatkan pembangunan pariwisata ialah kebijakan mengenai penanaman modal, ketenagakerjaan dan

keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

4. Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan meningkatkan pengalaman para wisatawan selama perjalanan mereka. Beberapa peraturan krusial yang harus diterapkan oleh pemerintah mencakup:

1. Peraturan keamanan terkait pencegahan kebakaran, termasuk persyaratan terkait jumlah minimum lampu darurat di setiap lantai hotel dan fasilitas keselamatan lainnya.
2. Peraturan perlindungan wisatawan yang mengatur biro perjalanan untuk meminta uang muka (deposit payment) dari wisatawan sebagai jaminan untuk layanan yang dipesan, seperti akomodasi dan tur.
3. Peraturan standar kompetensi bagi pekerja yang memerlukan keahlian khusus, seperti sopir, pilot, dan nahkoda.
4. Peraturan keamanan dan kesehatan makanan yang menetapkan standar kesehatan untuk makanan yang disajikan kepada wisatawan.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan pengalaman para wisatawan selama perjalanan mereka.

Berdasar Teori Subadra Dalam sektor pariwisata, pemerintah juga harus menciptakan obyek wisata baru, memfasilitasi pengembangan pariwisata, dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berwawasan masa depan. Semua ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman para wisatawan dan memajukan sektor pariwisata seperti penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah dan strategi pengembangan pariwisata.

2.8. Kerangka Berpikir

Dalam pengembangan pariwisata melalui pembangunan wisata, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengukur keberhasilannya Dipulau Burung Kabupaten Tanah Bumbu. Kerangka konsep ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa mengalihkan fokus. Berikut adalah kerangka konsep yang disusun oleh penulis.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

